

**KEBIJAKAN INDONESIA BERGABUNG DALAM SKEMA *JUST
ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP)***

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Oleh:

MUHAMMAD RIZKY FIRMAN

2110851008



DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

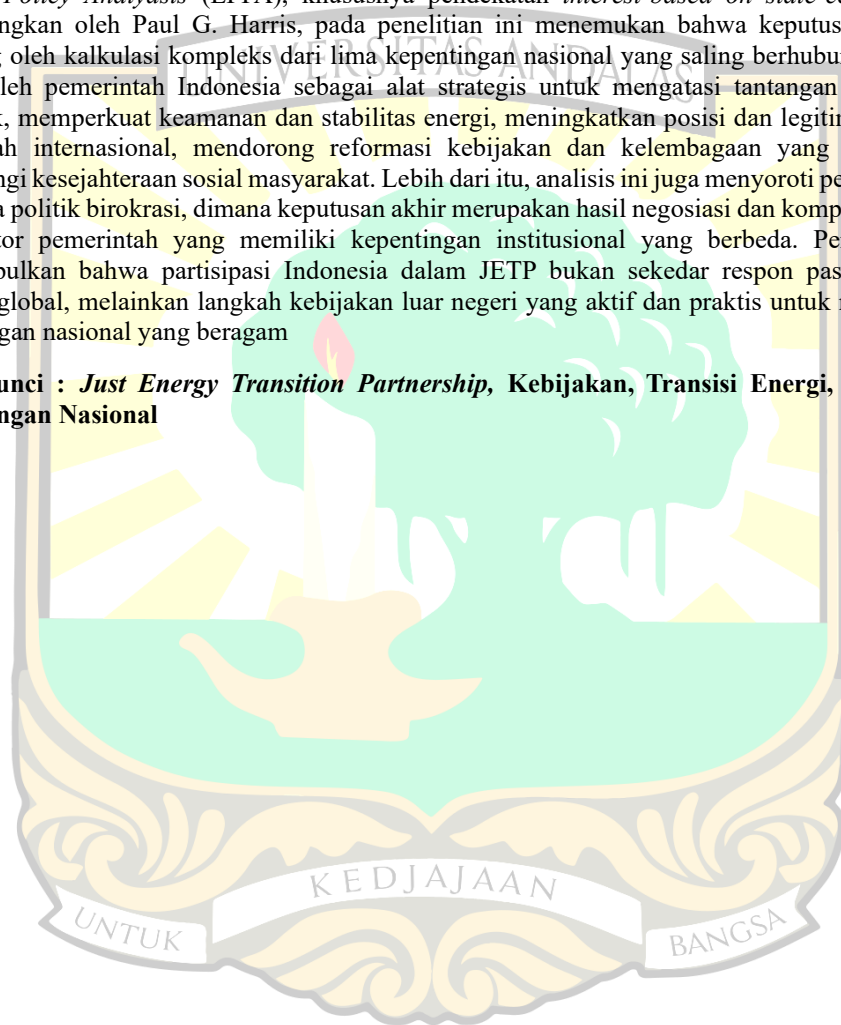
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

ABSTRAK

Indonesia dalam posisi dilematis antara memenuhi komitmen global untuk dekarbonisasi dan menjaga stabilitas domestik. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk transisi energi, Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, terutama batu bara yang memainkan peran strategis dalam sektor energi, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong di balik keputusan kebijakan luar negeri Indonesia untuk bergabung dalam skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Kerangka konseptual *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA), khususnya pendekatan *interest-based on state-centric* yang dikembangkan oleh Paul G. Harris, pada penelitian ini menemukan bahwa keputusan tersebut didorong oleh kalkulasi kompleks dari lima kepentingan nasional yang saling berhubungan. JETP dilihat oleh pemerintah Indonesia sebagai alat strategis untuk mengatasi tantangan pendanaan domestik, memperkuat keamanan dan stabilitas energi, meningkatkan posisi dan legitimasi politik di kancah internasional, mendorong reformasi kebijakan dan kelembagaan yang sulit, serta melindungi kesejahteraan sosial masyarakat. Lebih dari itu, analisis ini juga menyoroti peran penting dinamika politik birokrasi, dimana keputusan akhir merupakan hasil negosiasi dan kompromi antara aktor-aktor pemerintah yang memiliki kepentingan institusional yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi Indonesia dalam JETP bukan sekedar respon pasif terhadap tekanan global, melainkan langkah kebijakan luar negeri yang aktif dan praktis untuk memajukan kepentingan nasional yang beragam.

Kata Kunci : *Just Energy Transition Partnership, Kebijakan, Transisi Energi, Indonesia, Kepentingan Nasional*



ABSTRACT

Indonesia is in a dilemmatic position between fulfilling its global commitment to decarbonization and maintaining domestic stability. Although Indonesia has significant potential for developing and utilizing renewable energy sources (EBT) to support its energy transition, the country remains highly dependent on fossil fuels, particularly coal, which plays a strategic role in its energy, economic, and social sectors. This study aims to analyze the driving factors behind Indonesia's foreign policy decision to join the Just Energy Transition Partnership (JETP) scheme. Using a qualitative descriptive approach and literature study as the main data collection technique, the research applies the conceptual framework of Environmental Foreign Policy Analysis (EFPA), specifically the interest-based, state-centric approach developed by Paul G. Harris. The study finds that Indonesia's decision was driven by a complex calculation of five interrelated national interests. The government views JETP as a strategic instrument to address domestic financing challenges, strengthen energy security and stability, enhance political legitimacy and international standing, promote difficult policy and institutional reforms, and protect social welfare. Furthermore, this analysis highlights the crucial role of bureaucratic political dynamics, where the final decision emerged from negotiation and compromise among government actors with differing institutional interests. The study concludes that Indonesia's participation in JETP is not merely a passive response to global pressure, but rather an active and pragmatic foreign policy move to advance the country's diverse national interests.

Keywords: *Just Energy Transition Partnership, Policy, Energy Transition, Indonesia, National Interest*

